**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PROGRAM MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA (MOTEKAR) DI PROVINSI JAWA BARAT**

**Linda Mariana**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pasundan

Email:lindadifa75@gmail.com

**Abstrak :** Perkembangan era globalisasi saat ini memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi informasi. Banyaknya fenomena sosial yang memperlihatkan tatanan keluarga yang tidak utuh, akibat terjadinya kerapuhan keluarga diperlukan peran Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) dalam memperkuat ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan motode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian implementasi pembangunan ketahanan keluarga melalui MOTEKAR di DP3AKB Jawa Barat didasarkan pada regulasi kebijakan dan program yang sudah dilakukan oleh DP3AKB Jawa Barat sebagai upaya pembangunan ketahanan keluarga yang didalamnya terdapat faktor penghambat implementasi kebijakan yang menyebabkan implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga yang dilakukan MOTEKAR di Jawa Barat belum terlaksana secara optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)

**Abstract**:The contemporary era of globalization influenced family life structure and community life in the social, economic, cultural and information technology fields. There are many social phenomena that show an incomplete family structure, due to family fragility, the role of Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) is needed in strengthening family resilience. This research uses a policy implementation model developed by Van Meter and Van Horn. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results of research on the implementation of family resilience development through MOTEKAR in DP3AKB West Java are based on policy regulations and programs that have been carried out by DP3AKB West Java as an effort to build family resilience in which there are factors inhibiting policy implementation which have led to the implementation of family resilience development policies carried out by MOTEKAR in West Java has not been implemented optimally.

**Keywords:** Policy Implementation, Building Family Resilience, and Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)

**PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Orientasi pembangunan nasional diberbagai negara telah mengalami perubahan dengan menempatkan pembangunan social sejajar dengan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara yang sedang giat membangun dan telah menempatkan pentingnya aspek social dan ekonomi dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan social di Indonesia maka pembangunan keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional. Kekuatan pembangunan nasional berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro di masyarakat.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan social dan bermasyarakat. Keluarga juga merupakan sumber Pendidikan pertama dan utama bagi anak, sehingga dapat dikatakan bahwa anak mempelajari hal-hal dasar dari rumah terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketahanan keluarga dianggap sebagai pilar ketahanan nasional seperti yang diungkapkan oleh Dorothy (2012;119) yang menyebutkan bahwa:

“*families are constantly faced with multiple challenges (e.g., divorce, violence, economic hardship, mental and physical illnesses, immigration, who that impact not only individual family members but also the family system as a unit*. (Keluarga terus dihadapkan dengan berbagai tantangan misalnya perceraian, kekerasan, kesulitan ekonomi, penyakit mental dan fisik, sehingga imigrasi yang berdampak tidak hanya bagi anggota keluarga individu, tetapi juga system keluarga sebagai satu kesatuan. Sifat dinamis dari fungsi keluarga juga berdampak pada perkembangan ketahanan).”

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sunarti (2011;11-14) mengatakan bahwa indikator umum ketahanan keluarga dibagi kedalam tiga aspek yaitu ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan psikologis, dan ketahanan sosial. Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga terdiri dari 29 (Dua Puluh Sembilan) ciri-ciri yang mempresentasikan tingkat ketahanan keluarga terkelompok dalam 5 (lima) dimensi yaitu:

1. Dimensi 1 (satu) landasan legalitas dan keutuhan keluarga,
2. Dimensi 2 (dua) kondisi fisik yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan bagi semua anggota keluarga,
3. Dimensi 3 (tiga) ketahanan ekonomi keluarga digambarkan pada kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan,
4. Dimensi 4 (empat) keluarga mempunyai ketahanan social psikologis yang baik, dan
5. Dimensi 5 (lima) ketahanan sosial budaya merupakan salah satu dimensi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya.

Dalam penelitian ini fokus dimensi yang peneliti teliti yaitu dimensi 3 ketahanan ekonomi menyangkut pendidikan anak, dimensi 4 ketahanan sosial psikologis menyangkut ketahanan keluarga mengendalikan masalah fisik dan non fisik seperti pengendalian emosi scara positif, dan dimensi 5 terkait pencegahan perkawinan anak.

Penyelenggaaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai Amanah dari peraturan daerah harus dibentuk Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) yang saat ini menjadi salah satu program unggulan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat. MOTEKAR merupakan kader pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat desa/kelurahan setempat yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga pra-sejahtera dan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya agar lebih baik. MOTEKAR dalam proses pemberdayaan berfungsi sebagai pemberdaya yang pada dirinya memiliki kemampuan berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dari pengetahuan dan pengalaman hidupnya sehingga mampu memberikan motivasi mengenai nilai-nilai keberdayaan keluarga pada warga sasarannya. Taylor dan Kvalsvig dalam Fahrudin (2016;28) mengatakan bahwa MOTEKAR sebagai *social worker* atau pekerja sosial mempunyai peranan strategis dalam penguatan institusi keluarga dalam rangka mencapai ketahanan keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anak dan anggota keluarga yang lainnya bahkan dapat mengurangi permasalahan sosial yang terjadi. Oleh sebab itu, peran MOTEKAR sangat dibutuhkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Meter dan Horn (Agustino, 2006;142) keberhasilan suatu implementasi dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor: 1) ukuran dan tujuan yang diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanaka, 2)sumber daya kebijakan, merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu.

Data dari Badan Pusat Statistik menggambarkan bahwa provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48.274.162 juta jiwa ( Laki-laki 24.508.885, perempuan 23.765.277) atau 17,86 persen dari total populasi Indonesia 270,20 juta jiwa (BPS;2021). Menurut BPS Jabar tahun 2021 salah satu masalah sosial yang terjadi ialah perceraian, dengan jumlah yang bercerai sebanyak 37.503 orang, Adapun faktor penyebab perceraian ialah:

**Data Jumlah Perceraian Menurut Faktor Penyebab**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Faktor Penyebab** | **Jumlah** |
| 1 | Perzinahan | 16 |
| 2 | Mabuk | 52 |
| 3 | Drugs/Madat | 11 |
| 4 | Perjudian | 45 |
| 5 | Meninggalkan salah satu pihak | 1.563 |
| 6 | Dihukum Penjara | 53 |
| 7 | Poligami | 103 |
| 8 | KDRT | 125 |
| 9 | Cacat Badan | 21 |
| 10 | Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus | 17.336 |
| 11 | Kawin Paksa | 11 |
| 12 | Murtad | 113 |
| 13 | Ekonomi | 18.054 |

*Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2021*

Data diatas menunjukkan factor penyebab perceraian terbanyak adalah ekonomi. Hal terebut sejalan dengan jumlah penduduk miskin menurut provinsi dan daerah yang dikeluarkan oleh BPS Tahun 2022 yang menyatakan jumlah penduduk miskin Tahun 2021 semester I berjumlah 4.195,34 ribu jiwa (Perkotaan 3.051,05, pedesaan 1.144,29), semester 2 berjumlh 4.004,86 ribu jiwa (Perkotaan 2.951,07, pedesaan 1.053,79). Untuk tahun 2022 semester 1 penduduk miskin berjumlah 4.070,98 ribu jiwa (perkotaan 3.010,36, pedesaan 1.060,62). Perceraian menjadi salah satu isu yang menjadi tantangan di Jawa Barat dan memperlihatkan bahwa keluarga yang rentan dan becerai mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara konerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Menurut RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Bab IV Permasalahan dan isu Strategis Daerah poin Urusan Eajin Pelayanan Dasar Aspek Pelayanan Umum Bidang Pengendalian Kependudukan dan KB (IV-30) permasalahan bidang pengendalian penduduk dan KB meliputi: 1) pertambahan penduduk yang cepat karena migrasi dan kelahiran; 2) persebaran penduduk yang tidak merata, serta tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;3) belum optimalnya pembangunan keluarga di Provinsi Jawa Barat; dan 4) masih banyaknya usia kawin pertama penduduk Provinsi Jawa Barat di usia anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan masalah bahwa implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga di provinsi Jawa Barat belum optimal, anggaran program penguatan kapasitas kader MOTEKAR kurang dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan oleh kader MOTEKAR belum terpenuhi secara optimal.

Tinjauan Pustaka

Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaotannya dengan proses politik, terutama yang berkaitan dengan perumusan berbagai kebijakan negara. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nigro dan Nigro dalam Kencana (2006;24) yang menyebutkan bahwa administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka yang mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan Sebagian dari proses politik.

Kasim (1994;8) menyatakan bahwa “ Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap perumusan kebijakan, melainkan juga terhadap implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para perumus kebijakan publik”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa administrasi publik mempunyai peranan yang sangat penting karena tidak hanya berpengaruh pada perumusan kebijakan saja, akan tetapi berpengaruh juga terhadap implementasinya. Hal tersebut disebabkan karena administrasi publik juga berperan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan yaitu:

1. Teori George C Edward

Edward III (Subarsono, 2011;90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan,dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
5. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Adapun konteks implementasinya ialah : a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, b) karakteristik lembaga dan penguasa, c) kepatuhan dan daya tanggap.

1. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A.Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni, karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

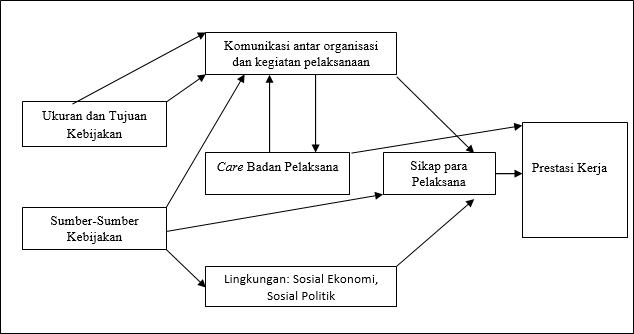
1. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Leo Agustino (2008;141) mengemukanan model *top-down* yang berpandangan bahwa dalam implementasi kebijakan perlu pertimbangan isi dan tipe kebijakan serta mengembangkan model proses implementasi yang merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu: a) ukuran dan tujuan kebijakan, b) sumber-sumber kebijakan, c) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, d)komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan, e) sikap para pelaksana dan f) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi menurut Van Meter dan Van Horn dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar**

**Model Proses Implementasi Kebijakan D.S. Van Meter dan Van Horn**

Sumber: Kebijakan Publik (Agus Subianto;69)

Dari berbagai teori implementasi kebijakan publik diatas, peneliti harus memilih teori yang tepat guna menyelesaikan masalah yang hendak dibenahi. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn karena dianggap sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga secara lebih mendalam.

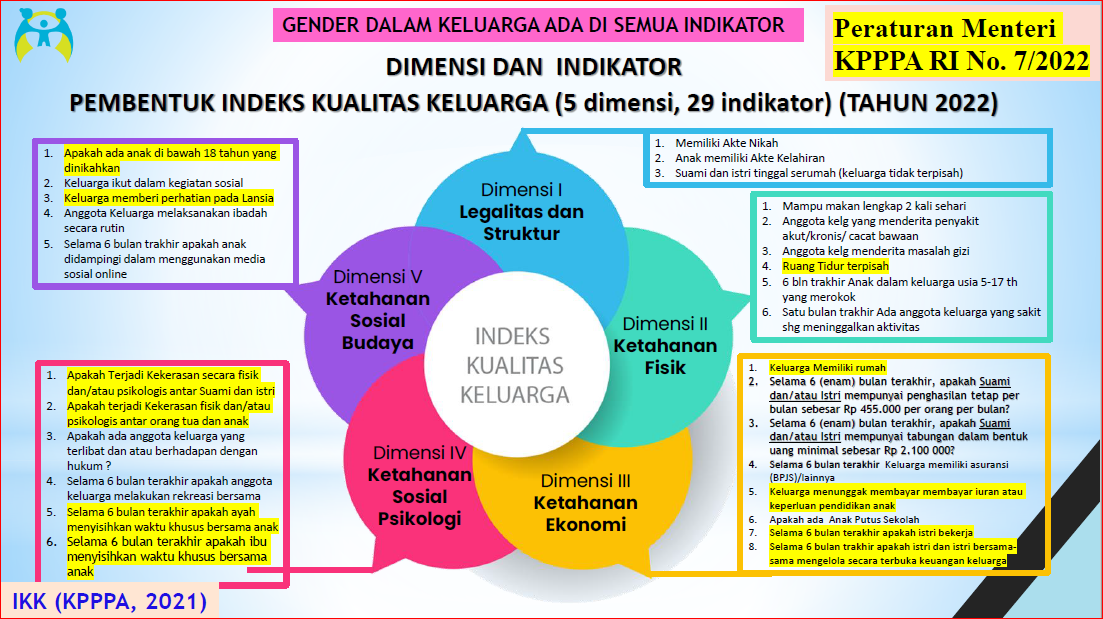
Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) ialah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti;2011), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai kondisi tantangan kehidupan keluarga (Walsh;2006).

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih Tangguh.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merumuskan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga terdiri dari 29 (dua puluh Sembilan) ciri-ciri yang merepresentasikan tingkat ketahanan keluarga yang dikelompokkan dalam 5 (lima) dimensi dan terbagi dalam 29 (dua puluh Sembilan variabel) yang digambarkan sebagai berikut:

**Gambar**

**Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga**



Berdasarkan gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa kelima dimensi tersebut adalah:

1. Legalitas dan Struktur Keluarga mempunyai 3 indikator; Penetapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. Pekawinan bukan saja harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut perundang-undangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri berserta anak keturunannya. Pentingnya legalitas perkawinan menurut perundang-undangan didasari pada perlunya jaminan perlindungan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan serta kejelasan asal-usul anak. Landasan legalitas keluarga dalam konteks ketahanan keluarga adalah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketahanan Fisik mempunyai 6 indikator; Kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang penting bagi tercapainya ketahanan keluarga. Dengan adanya kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Kesehatan fisik anggota keluarga secara umum dipengaruhi oleh berbagai kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup serta istirahat yang cukup dan nyaman. Dengan adanya asupan pangan yang sehat dan bergizi serta istirahat yang cukup dan nyaman maka diharapkan kondisi fisik anggota keluarga tersebut akan sehat jasmaninya serta terbebas dari berbagai penyakit dan keterbatasan (disabilitas).
3. Ketahanan Ekonomi mempunyai 8 indikator, Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga yang nyaman akan terjadi apabila keluarga tersebut memiliki dan menempati rumah atau tempat tinggal yang kondisinya layak. Sementara itu, kesinambungan kehidupan keluarga akan terjamin ketika keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anggota keluarganya. Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi berbagai ketidakpastian hidup di masa depan, maka keluarga juga selayaknya memiliki tabungan dalam jumlah yang memadai serta memiliki jaminan kesehatan berupa asuransi kesehatan dan sebagainya.
4. Ketahanan Sosial Psikologi mempunyai 6 indikator; Keluarga mempunyai ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga (Sunarti dalam Puspitawati (2015)). Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yanng tangguh pula.
5. Ketahanan Sosial Budaya mempunyai 5 indikator. Ketahanan sosial budaya merupakan salah satu dimensi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.

Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) merupakan salah satu program inovatif provinsi Jawa Barat untuk mengatasi permasalahan keluarga yang mana dalam prosesnya membantu untuk memberdayakan keluarga agar terwujud keluarga yang berkualitas maka dibutuhkan ketahanan keluarga sebagai suatu sistem.

Fungsi motekar yang paling utama adalah sebagai pemberdaya keluarga-keluarga yang mengalami berbagai kerentanan, sehingga dapat memfasilitasi dan mengadvokasi keluarga tersebut. Dalam memfasilitasi pemberdayaan keluarga, lingkup kerja tenaga motekar sesuai juknis yang dibuat BP3AKB (2014), mencakup:

1. **Mengidentifikasi**, yaitu melakukan kegiatan “identifikasi” terhadap suatu objek sasaran binaan, baik karakteristik perseorangan, keluarga, masyarakat maupun Desa/Kelurahan berkaitan dengan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki serta kendala dan peluang yang akan dihadapi agar nantinya dapat dikembangkan dengan baik. Biasanya dalam program pendampingan individu/keluarga diperoleh dengan melakukan wawancara langsung, untuk komunitas masyarakat harus ditunjang dengan data-data sekunder dan survey lapangan, sehingga dapat diperoleh “pemetaan” mengenai karakteristik komunitas masyarakat yang bersangkutan. Untuk melakukan identifikasi terhadap objek sasaran binaan maka harus jelas “tujuannya”, sehingga jenis yang akan diidentifikasi bersifat spesifik, misalnya identifikasi keluarga pra sejahtera, maka indikator kriteria prasejahtera harus diuraikan dalam bentuk daftar pertanyaan yang mudah dipahami mereka.
2. **Memotivasi**, yaitu suatu usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu “tergerak” melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Usaha ini dilakukan orang lain untuk mempengaruhi seseorang/sekelompok orang agar terdorong berbuat sesuatu agar tujuannya tercapai.
3. **Memediasi**, yaitu suatu usaha melakukan proses “pengikutsertaan” pihak lain (pihak ketiga) untuk menyelesaikan suatu masalah sebagai penasihat yang dianggap mampu membantu menyelesaikan masalahanya.
4. **Mendidik**, yaitu usaha memberikan “tuntunan” untuk merubah pola pikir, sikap dan perilaku seseorang berkaitan dengan akhlak, kecerdasan pikiran, keterampilan agar meningkatkan kualitas diri.
5. **Merencanakan**, yaitu usaha menyusun suatu “rencana” dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki melalui metode tertentu untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang diharapkan.
6. **Mengadvokasi**, yaitu usaha yang dilakukan untuk melakukan “pembelaan” terhadap orang atau kelompok orang yang dianggap posisinya lemah membutuhkan fasilitasi pertolongan.

**OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut (Sugiyono, 2010:14-15).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan meode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah motekar, fasilitator motekar dan implementator kebijakan dalam hal ini kepala dinas DP3AKB Jawa Barat. Analisis, gambaran, dan ringkasan mengenai kondisi, situasi dari data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau observasi mengenai yang terjadi dilapangan merupakan metode deskriptif kualitatif. Masalah pada penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui program motivator ketahanan keluarga di DP3AKAB Jawa Barat.

Pendekatanpenelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena pada umumnya permasalahannya belum jelas, holistik, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut diperoleh dengan pendekatan penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori (Sugiyono, 2010:399). Beberapa sumber data yang digunakan penulis berupa data primer dalam bentuk wawancara dan dokumentasi, Adapun data dukung dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan diperoleh melalui internet.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pembangunan Ketahanan Keluarga di Jawa Barat**

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 48,27 juta jiwa atau 17,86% dari total penduduk Indonesia dimana dari jumlah tersebit 23,94% populasi penduduknya adalah anak. Besarnya jumlah penduduk tentunya terdapat permasalahan yang sangat kompleks dan berkontribusi secara nyata terhadap kondisi penduduk dan kualitas keluarga. Permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini di Jawa Barat mengenai isu ketahanan keluarga diantaranya perceraian, pernikahan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

Permasalahan yang berkaitan dengan isu keluarga erat kaitannya dengan kualitas keluarga. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebesar 72,42 meningkat dibandingkan dengan tahun sebeleumnya 70,11. Namun masih dibawah angka nasional yaitu 73,43. Angka perkawinan anak juga masih terkategori tinggi meskipun secara angka mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. berdasarkan data BPS, prevalensi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 8,65. Sementara itu, angka perceraian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 98.930 kasus.

Peraturan atau regulasi yang menjadi acuan dari program pembangunan ketahahanan keluarga di Jawa Barat sudah dibuat, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pembentukan Motivator Ketahanan Keluarga
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 170 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga Berbasis Masyarakat
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 37/KK.03/PKK tentang Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) Tahun 2023

Berbagai program yang dilakukan oleh DP3AKB Jawa Barat dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga di Jawa Barat diantaranya ialah:

1. MOTEKAR, merupakan tenaga lini lapang berbasis masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan fisik, ekonomi, psiko-sosial dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, motekar juga melakukan identifikasi, edukasi, konsultasi, mediasi, dan advokasi terkait peningkatan ketahanan keluarga, pencegahan perkawinan anak, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Jumlah tenaga MOTEKAR 666 orang yang tersebar di 27 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
2. Tenaga Lapangan Terdepan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut TELADAN KB merupakan salah satu penggerak untuk mendukung upaya penguatan pembangunan keluarga, karena bersentuhan langsung dengan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembanguna keluarga ditingkat desa, sehingga keberhasilan program KB dapat dicapai.
3. Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui STOPAN JABAR (Stop Perkawinan di Jawa Barat) merupakan Gerakan bersama cegah perkawinan anak di Jawa Barat, dengan melibatkan sinergitas lintas sectoral baik pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha dan media massa.
4. Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui SEKOPER CINTA (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita) merupakan wadah perempuan Jawa Barat bertukar pengetahun dan pengalaman, menemu-kenali kebutuhan dan juga kepentingan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai upaya mewujudkan perempuan Jawa Barat yang mampu memberdayakan diri, keluarga dan lingkungan sekitarnya.
5. Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Warung Cetarrrr (Warung Cewek Setrong dan Ceriaa) merupakan wadah bagi perempuan kepela keluarga (PEKKA) untuk mensosialisasikan, memasarkan dan berjualan produk-produk hasil dari perempuan kepala keluarga.
6. Jabar CEKAS (Berani Cegah Tindakan Kekerasan) merupakan Gerakan berani mencegah kekerasan dengan mensosialisasikan 10 berani, yaitu: Berani Bicara, Berani Melapor, Berani Menolak, Berani Mencegah, Berani Berpihak Pada Korban, Berani Berkata Tidak, Berani Melawan, Berani Maju, Berani Bergerak, Berani Melindungi.
7. Layanan UPTD PPA Jabar ( Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban,pengelolaan kasus, layanan mediasi, penampungan semetara dan pendampingan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak.
8. **Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga di Jawa Barat**

Kebijakan maupun program penguatan ketahanan keluarga di Jawa Barat sudah dilaksanakan dengan optimal, namun hasil dari implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Ada faktor penghambat dalam pembangunan ketahanan keluarga di Jawa Barat, antara lain:

1. Jumlah motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR) tidak merata, jumlah motekar tidak sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada sehingga ada kecamatan yang tidak ada motekarnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat tidak bisa mengangkat MOTEKAR Kembali karena ada aturan dari Badan Kepegawaian Daerah terkait status dan kedudukan tenaga non ASN yang menghimbau untuk tidak menambah tenaga lapangan (non ASN) di lingkungan Provinsi Jawa Barat melalui surat dengan nomor : 2880/KPG.02/PPIK tertanggal 17 Oktober 2023.
2. Pembinaan lebih difokuskan pada Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi
3. Lokasi yang ditentukan per kecamatan tapi usulan Kab/Kota didasari lokasi desa/kelurahan yang daya kelentingan ketahanan keluarganya masih kurang/rendah.
4. Anggaran yang disediakan hanya untuk penguatan MOTEKAR, rapat koordinasi dan honorarium MOTEKAR sehingga anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi MOTEKAR tidak tersedia.
5. Pemerintah Kota Kabupaten belum mempunyai kepedulian yang sama terkait dengan implementasi kebijakan penguatan pembangunan ketahanan keluarga di Jawa Barat, hal ini terbukti dengan belum adanya anggaran untuk implementasi penguatan ketahanan keluarga di desa/kelurahan.
6. Penguatan pembangunan ketahanan keluarga merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan keterlibatan banyak pihak oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih intensif dan masif untuk melakukan koordinasi, kolaborasi maupun sinergitas baik dengan instansi/lembaga terkait, dunia usaha, media massa maupun masyarakat.
7. **Implmentasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga Melalui Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di DP3AKB Jawa Barat**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Menurut Winarno (2008:147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data terkait implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui MOTEKAR yang difokuskan pada pengasuhan anak dalam keluarga dan pencegahan serta penanganan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut:

1. **Ukuran dan Tujuan**

Van Meter dan Van Horn (2008) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketecapaian standar dan sasaran yang sudah ditetapkan. Implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, bahwa pembangunan ketahanan keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang, guna hidup harmonis dalam meningkatkan kebahagiaan lahir dan batin.

Hal ini sejalan dengan Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2008:141) mengemukakan model *top-down* berpandangan bahwa dalam implementasi kebijakan perlu pertimbangan isi dan tipe kebijakan serta mengembangkan model Proses implementasi yang merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan pubik yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variabel”. Model ini mengingatkan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

1. **Sumber Daya Kebijakan**

Sumber daya yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan yang menjadi pembinanya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat dan yang menjadi pelaksana di lapangannya adalah Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR). Peran Motekar dalam proses pemberdayaan keluarga berfungsi sebagai “pemberdaya” yang pada dirinya memiliki kemampuan berupa aspek: kognitif, afektif, dan psikomotorik dari pengetahuan serta pengalaman hidupnya, sehingga mampu mentransformasikan nilai-nilai keberdayaan tersebut kepada keluarga yang mengalami berbagai kerentanan atau kekurangberdayaan. MOTEKAR mempunyai tugas antara lain:

(a) mengidentifikasi,

(b) memberikan motivasi,

(c) memediasi,

(d) mendidik,

(e) merencanakan,dan

(f) mengadvokasi

Pembangunan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat Desa/Kelurahan di Jawa Barat. tenaga motivator ketahanan keluarga merupakan tenaga-tenaga aktivis pemberdayaan keluarga yang berpengalaman berasal dari daerah setempat untuk dapat melaksanakan tugas sebagai motivator ketahanan keluarga. penguatan motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar sebelum turun ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat MOTEKAR dalam memperkuat ketahanan keluarga. Pada tahun 2023 MOTEKAR sudah melakukan pendampingan ke tujuh puluh dua ribu tiga puluh tujuh keluarga rentan. Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat.

1. **Karakteristik Badan/ Instansi Pelaksana**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat merupakan organisasi yang berdiri pada tanggal 9 Januari 2009. Salah satu tugas pokok DP3AKB Jabar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang salah satu tupoksinya terkait dengan MOTEKAR. DP3AKB Jawa Barat merupakan dinas yang membentuk Motekar sebagai kader pemberdayaan masyarakat dan pembina dalam implementasi program MOTEKAR.

Motivator ketahanan keluarga, selanjutnya disebut Motekar, adalah tenaga motivator ketahanan keluarga ini direkrut, diseleksi, dan dilatih serta ditempatkan di daerahnya untuk dapat melaksanakan tugas sebagai motivator ketahanan keluarga. Program ini dimulai tahun 2014 dengan merekrut sekitar 1000 orang sebagai tenaga motivator ketahanan keluarga yang tersebar di 200 Desa/Kelurahan di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terutama daerah-daerah yang memiliki tingkat ketahanan keluarga yang relatif rendah, baik rentan dari aspek fisik, ekonomi, sosio-psikologi dan sosial budayanya.Program MOTEKAR memiliki indicator capaian kinerja berupa :

1. Indikator capaian umum, adalah tercapainya perubahan cara pandang dan perilaku keluarga sasaran menuju keluarga berkualitas baik lingkup pemikiran maupun perilaku dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
2. Indikator capaian khusus antara lain :
3. Berhasil mengidentifikasi keluarga sasaran dalam membangun ketahanan keluarga
4. Berhasil memotivasi keluarga sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya.
5. Berhasil membantu menyelesaikan permasalahan keluarga sasaran, dengan melibatkan atau tidak melibat pemangku kepentingan
6. Berhasil memberikan pendidikan keluarga yang berdampak pada tercapainya perubahan dalam cara berpikir, sikap dan berperilaku, serta memiliki keterampilan mengatasi permasalahan keluarganya dengan baik dan benar untuk menjadikan keluarga yang berkualitas.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Edwards dalam Winarno (2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

1. **Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Komunikasi yang dilakukan antara DP3AKB Jabar sebagai pembina MOTEKAR melakukan rapat koordinasi Motekar setiap tahunnya dan MOTEKAR harus memberikan Laporan kepada DP3AKB, ada 3 (tiga) laporan di setiap bulannya yang harus disampaikan yaitu : Untuk program STOPAN Jabar tanggal 1 – 31 Minimal ada 2 kali kegiatan, Pereview tanggal 10 – 13 didalamnya menilai 5 orang teman lainnya dan Laporan Bulanan tanggal 1 – 28 kegiatan di laporkan tanggal 5 bulan berikutnya. sedangkan aktivitas dari pelaksana berdasarkan fungsi MOTEKAR yang paling utama adalah sebagai pemberdaya keluarga-keluarga yang mengalami berbagai kerentanan, sehingga dapat memfasilitasi dan mengadvokasi keluarga tersebut antara lain berupa:

(a) Pentingnya kepemilikan akta nikah, akta kelahiran, dan akta lainnya yang dibutuhkan sebagai landasan hukum dalam suatu keluarga,

(b) Penguatan pola asuh anak agar tumbuh-berkembang menjadi anak yang sehat jiwa dan raganya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat,

(c) Penguatan ekonomi keluarga dengan melakukan pemberdayaan usaha yang sesuai dan mampu dilaksanakan anggota keluarga agar dapat menyekolahkan anak-anaknya pada pendidikan formal,

(d) Melakukan antisipasi atau pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perdagangan anak dan perempuan (trafficking), pelecehan seksual, HIV/AID,

(e) Melakukan fungsi-fungsi pemberdayaan keluarga terhadap keluarga yang memiliki berbagai kerentanan lainnya.

Sasaran kerja Motekar adalah melakukan pemberdayaan keluarga yang memiliki kerentanan fisik, ekonomi, sosio-psikologi, dan sosial budaya menuju keluarga berkualitas, yang meliputi: (1) Sehat lahir dan batin, (2) Terdidik, artinya memiliki pengetahuan membangun kehidupan keluarga yang baik ditunjang dengan pendidikan yang memadai, (3) Sakinah, artinya keluarga tersebut memiliki ketentraman, kepercayaan dan kedamaian dalam membangun maghligai rumah-tangga, (4) Penuh kasih-sayang atau warahmah, artinya dalam keluarga tersebut memiliki keikhlasan untuk saling memberi, saling memahami dan mengerti untuk berkorban demi kedamaian keluarga, sehingga dibutuhkan kesabaran dan dijauhkan dari kekerasan fisik dan mental, (5) Terlindungi hak-haknya, artinya bahwa dalam anggota keluarga, baik suami, istri, anak dan anggota keluarganya dalam organisasi keluarga menjalankan kewajiban sesuai perannya dan memiliki hak yang harus terlindungi.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

1. **Sikap Kecenderungan Para Pelaksana**

Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Rata – rata target pendampingan Motekar adalah 15 keluarga per orang per bulan dan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 165 keluarga per orang, pendampingan berkaitan dengan kualitas legalitas struktur (KLS) (32,75%) dimensi kualitas ketahanan fisik (KKF) (28,92%). Sementara itu yang paling rendah adalah pendampingan yang berkaitan dengan kualitas ketahanan sosial budaya (KKSB) (1.53%). permasalahan kesehatan merupakan tertinggi kedua setelah legalitas dan pendampingan yang paling sedikit dilakukan adalah masalah perkawinan anak. Padahal masalah perkawinan ini menjadi isu strategis dan perlu terus dikampanyekan.

Van Mater dan Van Horn (2008) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan *(befiltered)* lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana *(implementors)* dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan *(cognition)*, pemahaman dan pendalaman *(comprehension and understanding)* terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak *(acceptance, neutrality, and rejection),* dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Arah disposisi para pelaksana *(implementors)* terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *“crucial”.* *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Pada akhirnya, intesitas sikap para pelaksana *(implementors)* dapat mempengaruhi pelaksana *(performance)* kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya *intensitas disposisi* ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

1. **Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui program MOTEKAR berpengaruh pada lingkungan sosial terutama masyarakat rentan yang sedang dalam masalah.Masyarakat rentan merasa terbantu atas program ini, begitu juga terkait komunikasi, informasi dan edukasi yang diberikan oleh MOTEKAR menambah pengetahuan dan merubah pemikiran masyarakat rentan untuk memperjuangkan kepentingan keluarganya. Untuk lingkungan ekonomi sumber anggaran yang diberikan pemerintah terutama untuk pelaksanaan program MOTEKAR di lapangan tidak tersedia sehingga hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan intervensi pada masyarakat rentan dalam penguatan ekonomi masyarakat. Lingkungan politik terkait kondisi politik/kekuasaan yang dimiliki para pejabat pembuat dan pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam menetapkan dan menganggarkan program pembangunan ketahanan keluarga melalui MOTEKAR ini dengan pejabat yang peduli ketahanan keluarga pasti bisa berjuang untuk menganggarkan program ketahanan keluarga sementara menurut MOTEKAR lingkungan politik tidak berpengaruh di masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Implementasi Kebijakan Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga Melalui Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembangunan ketahanan keluarga di Jawa Barat didukung oleh regulasi kebijakan mulai dari peraturan daerah, peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur terkait pembangunan ketahanan keluarga.
2. Faktor penghambat dalam pembangunan ketahanan keluarga di Jawa Barat antara lain : jumlah MOTEKAR tidak merata dan DP3AKB Jabar tidak bisa mengangkat kembali non ASN karena ada surat dari Badan Kepegawaian Daerah terkait status dan kedudukan tenaga non ASN, pembinaan lebih difokuskan pada pendidikan kesehatan juga ekonomi, anggaran untuk pelaksanaan tupoksi MOTEKAR tidak tersedia, pemerintah kota kabupaten belum peduli terkait pembangunan ketahanan keluarga, dan perlu adanya koordinasi, kolaborasi juga sinergitas program dengan instansi/lembaga terkait, media massa, dunia usaha dan masyarakat.
3. Implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) yang difokuskan pada pengasuhan anak dalam keluarga dan pencegahan serta penanganan Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

1). Ukuran dan Tujuan

Kinerja implementasi kebijakan sudah sesuai dengan standar dan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR) di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

2). Sumber Daya Kebijakan

1. Sumber daya manusia pelaksana kegiatan dilapangan yakni MOTEKAR yang dimiliki dalam mengimplementasi kebijakan di desa/kelurahan belum memadai jika disesuaikan dengan luas wilayah kota/kab di Provinsi Jawa Barat.
2. Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dalam bentuk kegiatan di lapangan tidak tersedia hanya ada dana intensif sebesar Rp. 1.400.000/ bulan bagi motekar. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.
3. Sumber daya waktu yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dilakukan dengan memadukan kegiatan dengan lembaga masyarakat lain seperti kegiatan TP.PKK, majelis taklim dan BPD/LPM. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan sumber daya anggaran yang tidak ada bagi pelaksanaan program.

3). Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Karakteristik implementasi kebijakan sudah sesuai dengan karakteristik badan/ instansi pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat yang mana salah satu tugas pokok DP3AKB Jabar ada di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi pengendalian penduduk, pembinaan keluarga berencana, serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Pelaksana implementasi kebijakan

4). Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi sudah cukup optimal antara Pembina dan pelaksana implementasi kebijakan yaitu Motekar. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan rapat koordinasi Motekar setiap tahunnya dan motekar yang harus memberikan laporan kepada DP3AKB di setiap bulannya. Untuk aspek aktivitas pelaksana sudah sesuai dengan ukuran dan tujuan dari implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui motekar di Provinsi Jawa Barat.

5). Sikap/ Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik karena bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan tetapi bersifat top down hal tersebut terlihat dari pelaksanaan implementasi kebijakan di lapangan yang dilakukan MOTEKAR dalam setiap bulannya.

6). Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Lingkungan sosial, tanggapan dan reaksi masyarakat yang baik terkait adanya kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui MOTEKAR dibuktikan dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat tentang ketahanan keluarga setelah diberikan informasi, sosialisasi dan edukasi oleh tenaga motekar.
2. Lingkungan ekonomi, bagian dari sumber anggaran yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan hanya menganggarkan untuk pembinaan dan tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan program.
3. Lingkungan politik, kewenangan para pejabat untuk menentukan apakah kebijakan berjalan baik atau tidak terlihat dari program maupun anggaran yang ditetapkan yang tentunya sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan itu sendiri. Lingkungan politik pembuat kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui MOTEKAR di Jawa Barat belum optimal dilakukan terlihat dari tidak adanya anggaran implementasi kegiatan yang sudah diamanatkan pada MOTEKAR. Hal tersebut berpengaruh pada aktivitas yang dilakukan oleh MOTEKAR meskipun tidak berpengaruh langsung pada masyarakat.

**Saran**

1. **Saran Akademis**

Penelitian ini hanya mengkaji dan menjawab masalah implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui MOTEKAR di Provinsi Jawa Barat dilihat dari 3 (tiga) dimensi pembentuk indeks kualitas keluarga yaitu dimensi legalitas dan struktur, dimensi ketahanan sosial psikologis dan dimensi ketahanan sosial budaya sehingga belum menjawab masalah implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

1. **Saran Praktis**
2. Pembuat kebijakan harus mengevaluasi implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga melalui MOTEKAR guna dapat merumuskan program-program selanjutnya yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat termasuk mengalokasikan anggaran untuk implementasi kebijakan yang dilakukan oleh MOTEKAR di masyarakat dan mengadvokasi kota kabupaten dalam membantu merumuskan program pembangunan ketahanan keluarga termasuk anggaran yang bisa diimplementasikan oleh MOTEKAR.
3. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat harus tetap dilakukan agar dapat memperkuat wawasan, pengetahuan dan keterampilan motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR) serta adanya tambahan motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR) di kota kabupaten yang wilayahnya luas sementara MOTEKAR nya sangat terbatas.
4. Motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR) disarankan untuk memperkuat jejaring dalam implementasi kebijakan pembangunan ketahanan keluarga dengan pemerintah kota / kabupaten, organisasi yang ada di masyarakat, media maupun dunia usaha dalam memperlancar proses implementasi kebijakan ketahanan keluarga di wilayah dampingannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adi,Fahrudin. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama

Agustinus,leo.(2006).*Politik dan Kebijakan Publik*.Bandung: AIPI.

.(2008).*Politik dan Kebijakan Publik*.Bandung: AIPI.

Daft, Richard.L & Marcic, Dorothy (2013). *Management The New Workplace* (8th ed). Canada : South Western Cengage Learning.

Frankenberger, K., Weiblen, T., & Gassmann, O. (2014*). The antecedents of open business models : an exploratory study of incumbent firms* [ Karolin Frankenberger Tobias Weiblen Oliver Gassmann ]. R & D Management, 44(2), 173–188.

Hesel Nogi S.Tangkilisan.(2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*.Yogyakarta:Y.A.P

Kasim,M.(1994). *Analisis Kebijakan* *Negara*. Jakarta: Erlangga.

Kencana,Syafiie Inu.(2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta

Subarsono,A.G.(2011).*Analisis Kebijakan Publik,Konsep,teori, dan Aplikasi*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta

Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung. Alfabeta.

Sunarti, Euis. (2011). *Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga; isu strategis dalam analisis dampak kependudukan terhadap aspek social ekonomi* Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB

Walsh, F. (2006). *Strengthening Family Resilience*. 2nd Edition. New York: The Guildford Press.

Winarno,Budi.(2008). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

**Lain-lain**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2022

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan -BPS tahun 2019 – 2020 Tentang Indeks kualitas keluarga di Indonesia

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Tentang Tantangan Ketahanan Keluarga

Modul Pembangunan Ketahanan Keluarga KPPPA-BPS Tahun 2016

Modul KPPPA Tentang Pedoman Pemanfaatan Data Ketahanan Keluarga Untuk Intervensi Program Pembangunan Keluarga Tahun 2017

Modul BP3AKB Tentang Ketahanan Keluarga Bagi Motekar Tahun 2014

Modul DP3AKB Tentang Ketahanan Keluarga Tahun 2018

Undang- undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga,